

Judul : Jibaku rakyat menolak revisi UU TNI
Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Jibaku Rakyat Menolak Revisi UU TNI

Dengan tenda, anak-anak muda mengawal sidang paripurna pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan yang tak memenuhi aspirasi tidak mengurutkan perjuangan mereka memutus tegaknya supremasi sipil.

Tak seperti hari-hari lainnya, kejadian tidak biasa terjadi pada hari Kamis (20/3/2025). Jalan masuk kendaraan menuju wakil rakyat itu terblokir tiga tenda yang didirikan sekelompok warga sejak dini hari, sekitar pukul 00.00.

Hingga pukul 09.00, ketiga

tenda itu masih berdiri tegak.

Salsah (26), salah satu warga yang ikut mendirikan tenda, mengatakan bahwa berdasarkan kawan yang dilihatnya dari media sosial X, sertai di persiapan oleh tanda pagar (tagar) #TolakRUU TNI. Rencana itu bermula spontan untuk mengawal revisi UU TNI yang pada hari itu akhirnya disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.

Mereka sudi-sudi menolak revisi UU TNI disahkan meniadakan undang-undang yang bersempit dengan sertai di persiapan Salsah, juga di kemudian hari yang AHRB seperti terjadi di Orde Baru. Menurut dia, hal itu menunjukkan komunitas reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Di sisi lain, ia memilih para aparat bersenjata itu tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan sipil.

Keresahan yang sama juga diutarakan warga lainnya, Johan (32), yang sama-sama mendukung Salsah dan Salisa. Hanya saja, ia mengutip perihal sebaliknya di rumah sebelum kembali lagi ke tenda.

Semestinya, menurut Johan, TNI mengisi pos-pos jabatan yang sesuai kompetensi mereka. Khususnya jabatan yang menyalurkan urusan keamanan. Dikhwatirkan, pendekatan militeristik digunakan jika semakin banyak aparat bersenjata yang mengisi jabatan-jabatan sipil.

"Apologis, mereka punya senjata. Taktiknya nanti juga disalahgunakan sewaktu memimpin. Bisa saja jabatan-jabatan sipil dimanfaatkan untuk berperang pada pagi hari. Namun, mereka terlalu lama kibarkan bendera pada momen pengesahan RUU TNI. Alhasil, mereka terlalu banyak berperang saat seharusnya berhenti latar belakang dari mahasiswa hingga pekerja."

Mereka juga tidak mewakili komunitas terlentut. Hanya bersatu sebagai sesama warga yang memiliki keresahan.

"Keresahan ini sudah ada sejak semalam sebelumnya. Jadi, ka-



Sejumlah warga duduk di depan tenda, di Gerbang Pancasila, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Mereka menginap dan bertahan di lokasi itu sejak pukul 00.00. Aksi itu dilakukan sebagai penolakan atas rencana pengesahan revisi Undang-Undang TNI.

mi pikir, coba kami membuat dekorasi saja jalan masuknya ditarik terlewat," ujar Salsah.

Didatangi aparat

Bernamal di depan gerbang kantor wakil rakyat ternyata bukan hal mudah. Ada saja gangguan yang dihadapi Salsah dan teman-temannya. Mereka sempat dihadang aparat keamanan dan diminta berpindah lokasi kemah. Namun,

permintaan itu mereka tolak mentah-mentah.

Memang, tenda sudah berdiri. Bisa saja Salsah dan kawan-kawannya berharap sejak momen digelarannya pengesahan pada pagi hari. Namun, mereka terlalu lama kibarkan bendera pada momen pengesahan RUU TNI. Alhasil, mereka terlalu banyak berperang saat seharusnya berhenti latar belakang dari mahasiswa hingga pekerja.

"Semalam kami mengobrol saja. Mau tidak juga tidak bisa. Pikirannya macam-macam," ucapnya.

Salsah pun menyenggungkan rapat pembahasan RUU TNI yang sempat digelar di hotel dan berlangsung secara di-

rumah. "Itulah yang membuat kita berbunyi lagi," ujar Salsah.

Selama sidang paripurna permesahan RUU TNI menjadi undang-undang berlangsung.

Salsah, Johan, berserta massa mahasiswa dan masyarakat sipil tokoh mengikuti Youtuber.

Mengingkar reformasi

Susana pun memanas saat mereka mendengar RUU TNI

disahkan jadi undang-undang. Terlalu penolakan terlontar secara sporadis sembari mendekati gerbang besar yang yang telah sidang dimulai.

Salah terjaga semalam, Salsah dan teman-temannya merasa kembali kebohongan. Ia sangat menyayangkan keputusan DPR mengesahkan revisi itu.

Menurut dia, hal itu mengingkar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Lebih-lebih, aparat bersenjata memiliki mekanisme kepentingan yang mengandalkan komando terpusat.

"Jabatan sipil ini tidak bisa semata-mata lewat komando. Jangan-jangan nanti tidak ada

dialog buas. Kritik tidak didelegorkan. Raut kekebasaan berelapsasi semakin sempit," ucap Salsah.

Kendali sudah disahkan,

Salsah tidak akan berhenti melawan. Sehingga mungkin ia tutup agak mengikuti Youtuber.

Oleh karena itu, ia melanjutkan aksi bersama elemen masyarakat lainnya di area gerbang utama DPR.

Di latar itu, para mahasiswa dari berbagai pengurusan tinggi sudah lebih siap tuba, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Nasional, Trisakti, dan Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (Uhamka). Mereka secara bergantian menyampaikan orasi. Bahkan, seawal hujan mengguyur.

"Ternyata, bisa anggota DPR, suara masyarakat tidak lebih penting dari suara TNI. Jadi, sangat disayangkan pergeserannya yang sangat tergeses-gesa dan terkesan mengabaikan suara rakyat," kata Presiden HEM Uhamka Agus Salim, yang juga menjadi koordinator lapangan aksi.

Celakanya, sebut Agus, permerintah juga terkesan selalu

membuat kontroversi. Berkali-kali mereka mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk perdebatan publik, jadi memerlukan sewal-swalah seperti publikan. Rentetan persoalan itu mengalihbantik publik semakin garang. Gerakan masyarakat pun terbantuk secara natural.

"Terlalu banyak massa yang muncul dari hari ke hari. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat sipil untuk terus bergerak," kata Agus.

Tak berhenti bergerak

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Faiz Nahawi Mulya menyampaikan, kesadaran bergerak dilatar oleh sejarah. Terlebih pengurusan tinggi tersebut termasuk salah satu yang memotivasi terjadinya reformasi. Beberapa mahasiswa dari pengurusan tinggi itu juga gugur menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

"Semangat itulah yang membutuhkan kami, memaju miat kami untuk tetap mengawal agenda-agenda besar dari reformasi," kata Faiz.

Menurut Faiz, penyesahan revisi UU TNI menunjukkan bahwa DPR mengesampingkan hak-hak sipil. Seolah rakyat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan itu. Sebaliknya, pengesahan tiba-tiba saja terjadi dalam rapat paripurna.

Dalam akhirnya, Faiz meminta agar DPR mengesampingkan mengingkar supremasi sipil. Jangan sampai dwifungsi ABRI terlahir kembali. Dikhatirkannya, sistem pemerintahan militeristik akan mengusik jalannya demokrasi.

(NINO CITRA
ANUGRAHANTO/
HIDAYAT SALAM/
MACHRADIN WAHYUDI
RITONGA)